

TINJAUAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TERTINGGAL DI INDONESIA

St. Nur Rabiah¹, Muhammad Yusri Zamhuri², Bakhtiar Mustari³

¹ Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

² Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

³ Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

Email Korespondensi: bbia8383@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yaitu uji f (simultan) dan uji t (parsial) dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang, sedangkan sektor pariwisata, pajak daerah dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah, dan jumlah kunjungan wisatawan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the agricultural sector, the tourism sector, local taxes, and the number of tourist visits on the local revenue of Enrekang Regency. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Enrekang Regency and the Enrekang Regency Regional Revenue Agency. The method used in this is multiple linear regression analysis and hypothesis testing, F-test (simultaneous), and t-test (partial) all is calculated with software of SPSS version 22. The results show that the agricultural sector had a negative and significant effect on local revenue in Enrekang Regency. In contrast, the tourism sector, local taxes and the number of tourist visits had a positive and significant effect on local revenue in Enrekang Regency.

Keywords: Local revenue, agriculture sector, tourism sector, local tax, and number of tourist visit

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembangunan merupakan sektor fisik yang sangat penting, khususnya pembangunan daerah, merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat, baik mencakup bidang keuangan maupun faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Agar hubungan tersebut dapat terealisasi,

maka pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini terhadap suatu daerah sebagai penyedia barang dan jasa public (*public goods / public service*) dan hal ini dikaitkan dengan desentralisasi fiskal artinya sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih 2003).

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari : a.) Hasil pajak daerah, b.) Hasil retribusi daerah, c.) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d.) Dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD di Kabupaten Enrekang berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan didukung oleh berbagai informasi dari media online mengenai pengelolaan Pendapatan asli daerah Kab. Enrekang yang mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan secara terus menerus dari Rp. 14.650.195.063.45 – Rp. 99.669.276.952,00, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 66.043.333.304,00, tetapi pada tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali. berfluktuasinya penapatan asli daerah di kab. Enrekang itu sendiri tidak luput dari peran pemerintahannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah. Terjadinya desentralisasi fiskal diharapkan untuk setiap daerah dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daerah. Namun setiap daerah termasuk Kab. Enrekang masih belum tuntas dalam mencapai tujuan-tujuan diadakannya desentralisasi fiskal tersebut. Salah satunya yaitu masih belum tercapainya indikator kinerja daerah dilihat dari peningkatannilai PAD tiap tahun sehingga diperkirakan bahwa banyaknya transfer dana dari pusat berupa

dana perimbangan membuat pemerintah Kab. Enrekang belum mampu meningkatkan ekonomi wilayahnya untuk kualitas daerahnya sendiri menuju lebih baik.

Berdasarkan uraian persoalan yang terjadi dalam desentralisasi fiskal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitaian yang berjudul “Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan faktor yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya faktor Desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat (Maryanti, 2013). Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Syah dan Thomson (2002), dari 192 negara di dunia di tahun 2001 sebanyak 24 negara federal dari 20 negara kesatuan dengan elemen federal. Artinya secara implisit data tersebut dapat diinterpretasi bahwa 148 negara lainnya merupakan negara kesatuan berdesentralisasi (decentralized unitary state) atau negara kesatuan yang tidak berdesentralisasi. Sementara Cohen dan Peterson (1999) dalam Hoessein (2008) mengemukakan bahwa 106 dari 116 negara berkembang yang diklasifikasikan oleh PBB menganut desentralisasi merupakan negara kesatuan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah (misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa. Kedua, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil atau DBH (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi), dana alokasi umum atau DAU yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dan dana alokasi

khusus atau DAK. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain (Anggara S dalam Evi Nilawati, 2019).

Otonomi daerah resmi mulai berlaku di seluruh daerah Indonesia sejak 1 Januari 2001. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan di daerah, di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang. Penyelenggaraan otonomi daerah, merupakan penyerahan dan pelimpahan kewenangan pengurusan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara nyata dan bertanggungjawab termasuk penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan di bidang penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, 2020)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul Halim, 2004). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dan juga Pajak daerah

adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dan mencakup berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. (Prof Ahmad mazuki, 2018)

Sektor Pertanian

Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi dimana didalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan (Yani, 2015).

Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu pilar utama perekonomian, berkontribusi signifikan terhadap penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai sektor pertanian, termasuk subsektor dan perannya dalam pembangunan ekonomi. (Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA., 2020)

Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta keseluruhan fenomena alam dan buatan manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata (Muchlisin, 2019).

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu pilar utama perekonomian, berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempromosikan budaya serta keindahan alam. Berikut adalah penjelasan mengenai sektor pariwisata, termasuk definisi, jenis, dan prospeknya. (M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si., 2024)

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan

pemerintah daerah setempat (Pitana & Diarta dalam Suastika & Yasa, 2017).

Keterkaitan Antar Variabel

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sektor lainnya karena sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian, hal ini akan berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pertanian bukan dari pajak daerah, retribusi daerah maupun laba perusahaan daerah tetapi kontribusinya berasal dari dinas pertanian, semua penerimaan hasil pertanian akan menjadi hak milik Departemen Pertanian kemudian penerimaan secara keseluruhan masuk ke Penerimaan Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

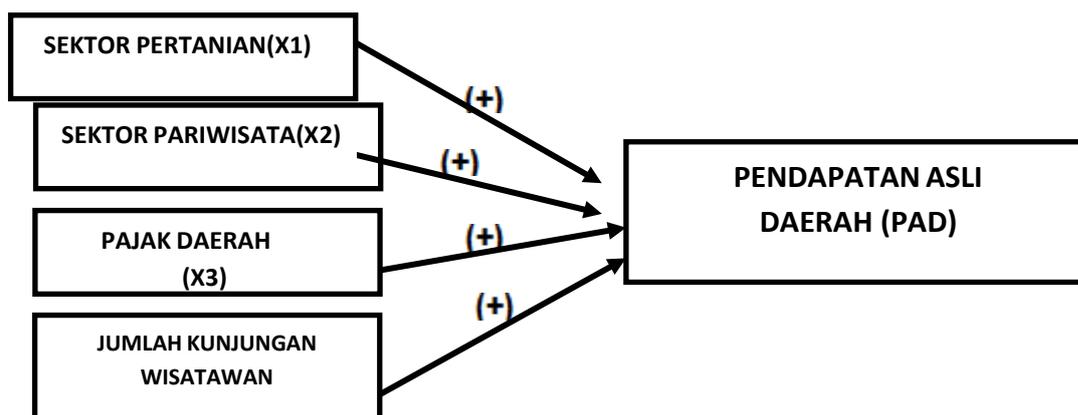
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyebutkan: Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berikutnya. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fisik antara pemerintah pusat dari pemerintah daerah (Akbar Mandela Arumatulabala Yunus, SE., MSi., 2024)

Pendapatan asli daerah dapat di peroleh dari berbagai sektor usaha besar seperti, sektor pertanian, sektor jasa, sektor perdagangan, sektor industry dan lain-lainnya ,dan sektor pariwisata dapat di kategorikan sebagai sumber pendapatan pada beberapa sector yang secara langsung dapat memberikan pemasukan pada penerimaan PAD (Ahmar, Nurlinda, Dan Mustafa 2012).Pajak daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengandemikian, daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Semakin

banyak penduduk suatu daerah, maka pajak daerah juga akan semakin besar. Daerah yang memiliki pendapatan pajak yang tinggi dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya tidak akan bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat lagi (Ardiyanto, 2018). Negara-negara yang menyumbang jumlah wisatawan terbesar ke Indonesia antara lain Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Peningkatan juga terlihat dari wisatawan asal Afrika dan negara-negara Asia lainnya (Mirzalina Zaenal, SE, M.SE., 2020)

Peningkatan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, ketika wisatawan meningkat dan pihak swasta serta pemerintah sebagai pihak yang mengelolah lalu merespon positif terhadap sektor pariwisata dengan melakukan pembenahan (Sarta Kapang, dkk 2019).

Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada Gambar 1 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
2. Diduga bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
3. Diduga bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
4. Diduga bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan aslidaerah.

METODOLOGI KAJIAN

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang dari tahun 2017-2021, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode regresi linear berganda (*Multiple Regression Method*), yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + Q1 X1 + Q2 X2 + \beta3 X3 + \beta4 X4 + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- Y = Pendapatan asli daerah
- X1 = Sektor pertanian
- X2 = Sektor pariwisata
- X3 = Pajak daerah
- X4 = Jumlah kunjungan wisatawan
- α = Konstanta
- $\beta1 \beta2 \beta3 \beta4$ = Koefisien Regresie
- ϵ = Error

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Hasil estimasi pengaruh sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah, dan jumlah kunjungan wisatwan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Enrekang. Persamaan regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Estimasi Fungsi Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, Pajak Daerah, dan Jumlah Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

Hubungan Variabel	Koefisien regresi	Std. Error	t-Hitung	Probabilita	Keterangan
Constanta	1871321255.000				
X1 → Y	-219.017	80.608	2,717	0.009	Signifikan

X2 → Y	97.148	22.906	4,241	0,000	Signifikan
X3 → Y	6.485	0.951	6,820	0,000	Signifikan
X4 → Y	799863.243	378871.036	2,111	0.039	Signifikan
*) Signifikan Pada $\alpha = 5\%$; T-Tabel = $1,67155R^2 = 0.835$ (83,5%) F-statistic = 69,778 Prob (F-statistic) = 0.000					

Sumber : SPSS (Diolah, 2022)

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui nilai R^2 sebesar 0.835 yang berarti 83.5% variasi kontribusi sektor pertanian (x1), sektor pariwisata(x2), pajak daerah(x3), dan jumlah kunjungan wisatawan (x4) dapat menjelaskan variasi pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang (Y). Sisanya sebesar 16,5% ditentukan oleh variabel atau faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang di luar model.

Dengan nilai F sebesar 69,778 dengan Sig. sebesar 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, sektor pariwisata, pajak daerah, dan jumlah kunjungan wisatawan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang pada taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa besarnya koefisien regresi sektor pertanian (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar -219,017 dengan nilai probabilitas 0.009 lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5 persen (0,05). Dilihat dari nilai T-Hitung lebih besar dari nilai T-tabel ($2,717 > 1,67155$). Hal ini artinya jika variabel PAD sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar Rp.1, maka PAD Kabupaten Enrekang akan mengalami penurunan sebesar Rp.219,017 dan variabel lainnya tetap. Artinya PAD sektor pertanian memiliki hubungan yang negatif secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa besarnya koefisien regresi sektor pariwisata (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 97.148 dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5 % (0,05), Dilihat dari nilai T-Hitung lebih besar dari nilai T-tabel ($4,241 > 1,67155$). Hal ini artinya jika variabel sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar Rp.1, maka PAD Kabupaten Enrekang juga akan mengalami peningkatan sebesar Rp 97,148 dan variabel lainnya tetap. Artinya PAD sektor pariwisata memiliki hubungan yang positif secara signifikan terhadap PAD Kabupaten

Enrekang.

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa besarnya koefisien regresi pajak daerah (X3) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 6,485 dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5 % (0,05). Dilihat dari nilai T-Hitung lebih besar dari nilai T- tabel ($6,820 > 1,67155$). Hal ini artinya jika variabel pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.1, maka PAD Kabupaten Enrekang juga akan mengalami peningkatan sebesar Rp.6,485 dan variabel lainnya tetap. Artinya pajak daerah memiliki hubungan yang positif secara signifikan dengan PAD Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa besarnya koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan (X4) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 799.863,243 dengan nilai probabilitas 0.039 lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5 % (0,05). Dilihat dari nilai T-Hitung lebih besar dari nilai T-tabel ($2,111 > 1,67155$). Hal ini artinya jika variabel kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan PAD Kabupaten Enrekang juga akan mengalami peningkatan sebesar 799.863,243 dan variabel lainnya tetap. Artinya jumlah kunjungan wisatawan memiliki hubungan yang positif dengan PAD Kabupaten Enrekang.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

PAD sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena sektor pertanian lebih berpartisipasi terhadap pengurangan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat sehingga hanya cukup meningkatkan pendapatan individu atau rumah tangga saja dan kurang memiliki pengaruh dengan pendapatan daerah. Dalam hal ini, sektor pertanian yang menjadi sektor yang paling mendominasi untuk kegiatan masyarakat dan kesejahteraan yang bersumber dari lahan usaha masyarakat melalui mata pencaharian sehari-hari, dan disebabkan pula karena pengelola retribusi dari pelayanan pasar kurang optimal dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwita, B. O.(2017) dimana hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa sektor pertanian dalam model regresi linier sederhana digunakan uji t test: (X1), dengan diperoleh nilai t-statistic= -0,694007 dengan probability sebesar 0,5136. Dengan signifikan dan alpha 0,05 (5%), diperoleh t tabel sebesar 2,571. Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang negative antara sektor pertanian (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) atau variabel sektor pertanian

(X1) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pringsewu (Y).

PAD dari sektor pariwisata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Enrekang. Artinya apabila PAD sektor pariwisata meningkat maka PAD Kabupaten Enrekang juga akan mengalami peningkatan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Enrekang begitu beragam. Alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Enrekang menawarkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kabupaten Enrekang terkenal dengan pariwisata dan budaya yang unik serta panorama alam yang indah dikenal di tingkat regional, nasional maupun mancanegara. Banyaknya objek wisata yang ada Kabupaten Enrekang tentu dengan tersendirinya akan menarik wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk datang ke daerah tersebut, tentu saja kedatangan wisatawan akan mendatangkan penerimaan terhadap Kabupaten Enrekang, dengan sendirinya akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulie Suryani(2017) memberikan kesimpulan bahwa variabel sarana pariwisata dan variabel objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Pariaman. Penelitian yang dilakukan oleh Insak (2014) juga memberikan kesimpulan bahwa persentase PAD bersumber dari sektor Pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Variabel pajak daerah (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD (Y). Apabila pajak daerah meningkat, PAD Kabupaten Enrekang juga akan mengalami peningkatan. Pajak Daerah Kabupaten Enrekang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015), Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. Marita dan Suardana (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Koefisien Determinasi (R^2), menunjukkan bahwa, besarnya

adjusted sebesar 0,939, berarti ke lima jenis pajak daerah sebagai variabel independen, secara serentak mampu memberikan kontribusi sebesar 93,90% terhadap PAD sebagai variabel dependen,

Variabel kunjungan wisatawan (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD (Y). Semakin banyak jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Enrekang akan meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang. Rantetadung (2012) menyatakan bahwa pengaruh kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah setiap tahunnya menjadikan sektor pariwisata mengembangkan tempat wisata agar banyak dikunjungi oleh wisatawan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjungi. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi Daerah Tujuan Wisata (DTW) terutama sebagai sumber pendapatan daerah (Nasrul, 2010).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Sudiana (2016). Memberikan kesimpulan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli. Pertiwi, N. & Gede, N. L. (2014) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa Jumlah Kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar tahun 1992- 2012.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sektor pertanian lebih berpartisipasi terhadap pengurangan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat sehingga hanya cukup meningkatkan pendapatan individu atau rumah tangga saja dan kurang memiliki pengaruh dengan pendapatan daerah, dan disebabkan pula karena pengelola retribusi dari pelayanan pasar kurang optimal dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan potensi yang dimiliki Kabupaten Enrekang begitu beragam. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Hal ini disebabkan karena banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- i. Melakukan peningkatan kualitas manajemen pengumpulan retribusi sektor pertanian,
- ii. Penelitian lanjutan terkait dengan sumber-sumber potensial di sektor pertanian Kabupaten Enrekang yang belum tergali dalam rangka mendukung peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan daerah,
- iii. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang disarankan agar lebih meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan promosi wisata daerah,
- iv. Pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan lagi kontribusi dalam pajak daerah agar pajak daerah lebih besar lagi memberikan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang.
- v. Diperlukan optimalisasi upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar di STA,
- vi. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajiban pajak maupun retribusi daerahnya

REFERENSI

- [1] Abdul, H. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- [2] Ahmar & Nurlinda & Mustafa Muhani. (2012). *Peranan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*. *Jurnal Equilibrium*. 2(1), 113-121
- [3] Akbar Mandela Arumatulabala Yunus, SE., MSi., (2021) *nterlinkages of Fiscal Decentralization, Financial Development, and Carbon Emissions: The Underlying*

Significance of Natural Resources

- [4] Akbar Mandela Arumatulabala Yunus, SE., MSi., (2024) Formulate an incentive model to involve communities' industries in coastal waste management, Makassar, Indonesia
- [5] Evi, N. (2019). *Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Maksipreneur, 9(1), 41-60
- [6] Kapang, S., & Ita, P.R., & Mauna Th, B.M. (2019). *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(4), 84-94
- [7] M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si. (2023) The Development Strategy of Freshwater Lobster Business as a Coastal Economic Strengthenener
- [8] Maryanti, E.S. (2013). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal akuntansi. 1(2):1-12
- [9] Muchlisin, dkk. *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018*, JIMEK – 2(1)
- [10] Natoen, A., & Evada, D., & Yuliana, S., & Susi, A., & Karina, L. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 2(1), 7-15
- [11] Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA. (2020) The influence of individual characteristics on the performance of nutrition program in ambon city public health cente
- [12] Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta:Ghalia Indonesia.